

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab IV, maka dapat diangkat kesimpulan-kesimpulan khusus yang menjawab setiap sub-pertanyaan penelitian, kemudian sari patinya dituangkan dalam kesimpulan umum yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan utama penelitian.

1. Gambaran keadaan permintaan akan taman kanak-kanak per wilayah di Kotamadya DT II Bandung selama tahun 1987/1988 - 1991/1992.

Pertama, Wilayah Bojonegara, Cibeunying, Karees dan Tegallega sampai dengan tahun 1991/1992 masih merupakan wilayah-wilayah di Kotamadya DT II Bandung yang tingkat kepadatan penduduknya relatif tinggi yakni berkisar antara 142 jiwa per Ha - 184 jiwa per Ha, sedangkan Wilayah Ujungberung dan Gedebage tingkat kepadatannya masih relatif rendah yakni 37 jiwa per Ha.

Kendatipun Wilayah Ujungberung dan Gedebage sampai dengan tahun 1991/1992 masih relatif rendah tingkat kepadatan penduduknya, tetapi kedua wilayah ini merupakan wilayah sangat potensial untuk

menjadi wilayah terpadat penduduknya di Kotamadya DT II Bandung mengingat kedua wilayah ini merupakan wilayah pengembangan kawasan industri, kawasan perkantoran dan kawasan perumahan. Hal ini tercermin dari tingkat laju pertumbuhan penduduk di kedua wilayah ini yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kotamadya DT II Bandung yakni 3.48%.

Kedua, Data absolut maupun data relatif tentang jumlah penduduk Kotamadya DT II Bandung yang berusia 4 dan 5 tahun (Populasi penduduk usia TK) berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan metode pengganda Sprague (*The Sprague Multipliers*) yang bertumpu pada keadaan penduduk Kotamadya DT II Bandung kelompok usia 0-19 tahun selama tahun 1987/1988 - 1991/1992, menunjukkan bahwa Wilayah Tegallega merupakan satu-satunya wilayah di Kotamadya DT II Bandung yang memiliki tingkat laju pertumbuhan penduduk usia 4 dan 5 tahun yang sangat tinggi yakni berkisar antara 7.51% sampai dengan 7.77%.

Ketiga, Jumlah anak didik taman kanak-kanak (TK) Kelompok B dan C di Wilayah Bojonegara, Cibeunying dan Karees sampai dengan tahun 1991/1992 berkisar antara 3117 - 4463 orang anak didik, sedangkan di wilayah Tegallega, Ujungberung dan Gedebage berkisar antara 1261 - 2016 orang anak didik.

Angka partisipasi murni pendidikan pada TK (Persentase jumlah anak didik TK Kelompok B terhadap

jumlah penduduk usia 4 tahun dan persentase jumlah anak didik TK Kelompok C terhadap jumlah penduduk usia 5 tahun) di Kotamadya DT II Bandung sampai dengan tahun 1991/1992 sebesar 36.08% ke bawah.

Angka partisipasi murni pendidikan pada TK Kelompok B di Kotamadya DT II Bandung, tertinggi di Wilayah Bojonegara sebesar 21.06% dan terendah di Wilayah Tegallega sebesar 6.06%, demikian pula halnya dengan angka partisipasi murni pendidikan pada TK Kelompok C tertinggi adalah Wilayah Bojonegara sebesar 36.08% dan terendah di Wilayah Tegallega sebesar 14.81%.

Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan angka partisipasi murni pendidikan pada TK Kelompok B maupun Kelompok C menunjukkan permintaan penduduk Kotamadya DT II Bandung akan TK selama tahun 1987/1988 sampai dengan 1991/1992 di Wilayah Bojonegara, Cibeunying, Karees dan Tegallega telah *jenuh* yang tercermin dari laju pertumbuhan angka partisipasi murni pendidikan pada TK relatif rendah, bahkan cenderung menurun.

Berbeda dengan keadaan pada keempat wilayah di atas, laju pertumbuhan angka partisipasi murni pendidikan pada TK di Wilayah Ujungberung dan Gedebage justru relatif tinggi yakni sebesar 2.49% - 2.65% untuk TK Kelompok B dan sebesar 8.52% - 9.13% untuk TK Kelompok C.

Keempat, Profil TK yang diminati masyarakat Kotamadya DT II Bandung sampai dengan tahun 1991/1992

berdasarkan studi kasus-kualitatif menunjukan :

- a. Pelopor yang mendirikan TK swasta merupakan orang-orang yang aktif dalam organisasi sosial atau keagamaan dengan maksud utama untuk menanamkan nilai-nilai agama atau keyakinan mereka kepada anggota masyarakat dalam usia yang sedini mungkin, oleh karena itu keikhlasan, kerja keras dan kreativitas yang ditunjukkan para pelopor yang mendirikan TK beserta tenaga kependidikannya telah memberikan kontribusi terbesar dan terutama dalam mempertahankan eksistensi TK pada tahap awal masa berdirinya.

Berbeda dengan pendirian TK swasta yang tumbuh dengan dukungan keikhlasan, kerja keras dan kreativitas para pengelolanya, maka TK Negeri didirikan dengan dukungan penuh pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, baik yang berkenaan dengan penyediaan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana pendidikan maupun biaya.

- b. Misi, tujuan dan materi pendidikan pada dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 dan Kurikulum TK yang dibakukan pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Khusus untuk TK swasta ditambah dengan misi, tujuan dan materi pendidikan yang sesuai dengan misi khusus yang diemban masing-masing TK (TK swasta yang dijadikan kasus dalam penelitian ini mempunyai misi khusus: Islam, Katolik, Kristen Protestan dan Pembauran antara WNI asli dengan WNI keturunan asing).

TK yang mempunyai misi khusus keagamaan, mengembangkan materi pendidikan agama yang menitik beratkan kepada aspek *keimanan* dan *latihan ibadat* sesuai dengan ajaran agama yang dijadikan misi khusus masing-masing TK, sedangkan pada TK yang mempunyai misi khusus pembauran antara WNI asli dengan WNI keturunan asing lebih menitik beratkan pada pengayaan materi pendidikan Bidang Pengembangan Pendidikan Moral Pancasila.

Misi dan tujuan khusus yang menjadi ciri khas TK swasta tersebut belum dijabarkan secara terperinci ke dalam Garis-garis Besar Program Pengembangan tertentu, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada setiap tenaga kependidikan yang telah menganut agama yang sesuai dengan misi khusus masing-masing TK untuk mengembangkan materi pendidikannya.

- c. Tenaga kependidikan pada TK Negeri seluruhnya pegawai negeri sipil dan berijazah SPG Jurusan TK, sedangkan pada TK swasta pada umumnya pegawai swasta dan tidak seluruh tenaga kependidikannya berijazah SPG Jurusan

TK, bahkan ada TK yang sangat banyak diminati masyarakat justru seluruh tenaga kependidikannya bukan lulusan SPG Jurusan TK.

Guru TK yang status kepegawaiannya pegawai negeri sipil mempunyai golongan ruang II/a sampai dengan II/d dan Kepala TK yang status kepegawaiannya pegawai negeri sipil mempunyai golongan ruang III/a sampai dengan III/c.

Gaji tenaga kependidikan di TK beraneka ragam. Mereka yang bertugas di TK swasta menerima gaji antara Rp.35000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.500000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan mereka yang bertugas di TK Negeri menerima gaji sesuai dengan peraturan gaji guru/ kepala TK yang berstatus pegawai negeri sipil ditambah honorarium minimal Rp. 15000,- (Lima belas ribu rupiah) per bulan.

- d. Anak didiknya cenderung menganut agama yang sesuai dengan misi TK yang dimasukinya, demikian pula orang tua anak didik mempertimbangkan faktor kesesuaian agama mereka dengan misi khusus masing-masing TK.

Adapula kecenderungan bahwa anak didik yang berasal dari keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi tertentu dan bahkan ras tertentu mengelompok di TK-TK tertentu.

- e. Biaya pendidikan yang dibayarkan masyarakat kepada TK

tempat anak mereka didik beraneka ragam yakni antara Rp.25000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.700000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang pangkal, sedangkan untuk uang bayaran per bulan antara Rp. 4000,- (Empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.30000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

- f. Prasarana pendidikan, khususnya ruangan kelas, meja dan kursi untuk anak didik, jumlahnya sesuai dengan jumlah anak didiknya, kecuali pada beberapa TK yang sangat diminati masyarakat jumlah prasarana pendidikannya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anak didiknya.
- g. *Menjanjikan* kemudahan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya, karena TK dikelola secara terpadu dengan SD, SMP dan SMA yang telah mempunyai *citra prestasi akademis baik* di masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan khusus di atas, maka dapat diangkat suatu kesimpulan umum berikut ini :

Permintaan masyarakat Kotamadya DT II Bandung selama tahun 1987/1988 - 1991/1992 akan TK dilihat dari angka partisipasi murni pendidikan pada TK relatif rendah. Angka partisipasi murni pendidikan pada TK di setiap wilayah Kotamadya DT II Bandung beraneka ragam dan tidak selalu sejalan dengan tingkat laju pertumbuhan populasi penduduk usia TK di wilayah yang bersangkutan.

Profil TK yang diminati masyarakat adalah TK yang memiliki misi khusus keagamaan atau keyakinan yang jelas dan secara konsisten/ ajek dalam arti ketetapan dan kemantapan dalam merealisasikan misi khusus tersebut dalam mendidik anak didik mereka dan *menjanjikan kemudahan* melanjutkan studi ke jenjang SD, SMP dan SMA yang memiliki *citra prestasi akademis baik* di masyarakat.

Suatu TK pun diminati masyarakat karena biaya pendidikan yang harus mereka bayar sesuai dengan tingkat kemampuan keuangan mereka, kendatipun ada indikasi TK tertentu sangat diminati oleh ras tertentu (WNI keturunan Cina).

Sedangkan faktor kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan dan kelengkapan prasarana pendidikan tidak menjadi daya tarik utama bagi masyarakat dalam memilih suatu TK untuk anak mereka.

2. Proyeksi keadaan permintaan akan taman kanak-kanak per wilayah di Kotamadya DT II Bandung untuk tahun 1992/1993 - 1996/1997.

Pertama, *Ratio* penduduk usia 4 tahun - penduduk usia 5 tahun pada setiap wilayah di Kotamadya DT II Bandung = 1:1, sedangkan jumlah penduduk usia 4 dan 5 tahun terbanyak ada di Wilayah Tegallega, kemudian diikuti Wilayah: Bojonegara, Cibeunying, Karees,

Ujungberung dan Gedebage. Hal ini berarti proyeksi permintaan masyarakat akan TK Kelompok B dan TK Kelompok C pada setiap wilayah di Kotamadya DT II Bandung untuk tahun 1992/1993 - 1996/1997 secara *potensial* seimbang.

Kedua, Kendatipun jumlah populasi penduduk usia TK (4 dan 5 tahun) di Wilayah Tegallega diproyeksikan dalam tahun 1992/1993 - 1996/1997 paling banyak dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Kotamadya DT II Bandung, tetapi justru jumlah anak didik TK di wilayah ini diproyeksikan paling sedikit mengingat angka partisipasi murni pendidikan pada TK di wilayah ini paling rendah. Hal yang sebaliknya dari keadaan di Wilayah Tegallega diproyeksikan terjadi di Wilayah Ujungberung dan Wilayah Gedebage. Sedangkan anak didik di wilayah: Cibeunying dan Karees diproyeksikan sedikit turun jumlahnya dari tahun dasar.

Ketiga, Profil TK yang diminati masyarakat Kotamadya DT II Bandung untuk tahun 1992/1993 - 1996/1997 diproyeksikan TK yang mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan isi kesimpulan kesatu butir keempat di atas.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan khusus di atas, maka dapat diangkat suatu kesimpulan umum berikut ini :

Untuk tahun 1992/1993 sampai dengan tahun 1996/1997 diproyeksikan permintaan masyarakat Kotamadya DT II

Bandung akan TK masih relatif rendah. Titik terendah permintaan masyarakat akan TK diproyeksikan terjadi di Wilayah Tegallega, sedangkan peningkatan permintaan masyarakat akan TK secara berarti diproyeksikan terjadi di Wilayah Ujungberung dan Wilayah Gedebage.

3. Gambaran keadaan taman kanak-kanak per wilayah di Kotamadya DT II Bandung sampai tahun 1991/1992 dan kaitannya dengan proyeksi kebutuhan guru serta prasarana pendidikan untuk tahun 1992/1993 - 1996/1997.

Pertama, Persentase terbesar dari penyebaran anak didik TK di Kotamadya DT II Bandung terdapat di Wilayah: Bojonegara, Cibeunying, Karees dan Tegallega. Di wilayah-wilayah ini pula terdapat sekitar 33 buah TK yang jumlah anak didiknya lebih dari seratus orang per TK atau 35.71% dari seluruh jumlah anak didik TK di Kotamadya DT II Bandung berada di 33 buah TK tersebut. Sisanya tersebar pada 286 buah TK yang berarti rata-rata per kelompok pada satu TK sebanyak 19 orang.

Kedua, *Ratio* guru yang berstatus pegawai negeri sipil dengan guru swasta di Wilayah: Cibeunying, Karees dan Tegallega seimbang (ratio = 1:1); Bojonegara dan Gedebage rasionya = 1:2; sedangkan Ujungberung rasionya = 1:3.

Ratio guru yang tidak berwenang penuh sebagai guru TK dengan guru yang berwenang penuh sebagai guru TK di Wilayah Tegallega seimbang ($\text{ratio} = 1:1$); Bojonegara dan Ujungberung rasionya = $1:2$; Cibeunying dan Karees rasionya = $1:3$; sedangkan Gedebage rasionya = $1:13$.

Bagian terbesar (89.02% - 95.57%) guru TK di seluruh wilayah Kotamadya DT II Bandung berusia 50 tahun ke bawah.

Merujuk kepada proyeksi kebutuhan total guru TK di setiap wilayah Kotamadya DT II Bandung untuk tahun 1992/1993 - 1996/1997 dikaitkan dengan guru TK yang pensiun pada tahun proyeksi, maka diproyeksikan kekurangan guru TK akan terjadi di Wilayah Ujungberung sebanyak 100 orang dan Wilayah Gedebage sebanyak 25 orang. Jika dikaitkan dengan guru TK yang pensiun dan guru yang tidak berwenang penuh sebagai guru TK, maka kekurangan guru TK akan terjadi di Wilayah: Ujungberung sebanyak 138 orang; Gedebage sebanyak 31 orang; dan Bojonegara sebanyak 69 orang. Jika dikaitkan dengan guru TK yang pensiun, guru yang tidak berwenang penuh sebagai guru TK dan guru honorer, maka diproyeksikan kekurangan guru akan terjadi di Wilayah: Ujungberung sebanyak 141 orang; Gedebage sebanyak 32 orang; Bojonegara sebanyak 137 orang; dan Tegallega sebanyak 16 orang.

Ketiga, Keadaan ruangan kelas TK sampai dengan tahun 1991/1992, jika dikaitkan dengan kebutuhan ruangan kelas

TK pada setiap wilayah di Kotamadya DT II Bandung untuk tahun 1992/1993 - 1996/1997 diproyeksikan selain Wilayah Cibeunying dan Wilayah Tegallega, maka wilayah-wilayah lainnya memerlukan tambahan ruangan kelas, tetapi jika ruangan kelas digunakan dua kali dalam sehari (Kelas pagi dan kelas siang), maka hanya Wilayah Ujungberung dan Wilayah Gedebage yang masih memerlukan tambahan ruangan kelas.

Keempat, Keadaan meja untuk anak didik TK sampai tahun 1991/1992, jika dikaitkan dengan kebutuhan meja untuk anak didik pada setiap wilayah di Kotamadya DT II Bandung untuk tahun 1992/1993 - 1996/1997 diproyeksikan seluruh wilayah masih memerlukan tambahan meja untuk anak didik, kecuali jika meja untuk anak didik digunakan dua kali dalam sehari (Kelas pagi dan kelas siang), maka hanya Wilayah Ujungberung dan Wilayah Gedebage yang masih memerlukan tambahan meja untuk anak didik.

Keadaan kursi untuk anak didik TK sampai tahun 1991/1992, jika dikaitkan dengan kebutuhan kursi untuk anak didik pada setiap wilayah di Kotamadya DT II Bandung untuk tahun 1992/1993 - 1996/1997 diproyeksikan selain Wilayah: Cibeunying, Karees dan Tegallega, maka wilayah-wilayah lainnya memerlukan tambahan kursi untuk anak didik, tetapi jika kursi untuk anak didik digunakan dua kali dalam sehari (Kelas pagi dan kelas siang), maka hanya Wilayah Ujungberung dan Wilayah Gedebage yang masih

memerlukan tambahan kursi untuk anak didik.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan khusus di atas, maka dapat diangkat suatu kesimpulan umum berikut ini :

Penyebaran anak didik TK di Kotamadya DT II Bandung tidak merata, baik penyebaran anak didik antar wilayah maupun penyebaran anak didik antar TK. Di satu sisi ada TK yang *kejenuhan* menerima calon anak didiknya dan mempunyai anak didik yang melebihi daya dukung prasarana pendidikan yang dimilikinya, sedangkan di sisi lain ada TK yang sangat kekurangan jumlah anak didiknya.

Jumlah guru, ruangan kelas, meja dan kursi untuk anak didik yang ada pada TK di setiap wilayah Kotamadya DT II Bandung sampai tahun 1991/1992 pada umumnya diproyeksikan akan mampu mendukung kebutuhan guru dan prasarana pendidikan untuk tahun 1992/1993 - 1996/1997 jika digunakan dua kali dalam sehari (Kelas pagi dan kelas siang), kecuali untuk Wilayah Ujungberung dan Wilayah Gedebage yang masih sangat memerlukan tambahan prasarana pendidikan tersebut.

4. Implikasi

Implikasi yang dikemukakan dalam bagian ini, pada dasarnya merupakan sari pati dari implikasi yang diangkat berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasannya sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab IV, khususnya Bagian B laporan penelitian ini.

Pertama, Diperlukan upaya untuk meningkatkan angka partisipasi murni pendidikan pada TK dan sekaligus meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di TK, upaya yang simultan dalam bentuk penyediaan TK yang kurikulumnya mempunyai muatan khusus pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianut masyarakat, disamping biaya pendidikannya terjangkau oleh kemampuan keuangan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan makna TK bagi anak yang berada pada periode kanak-kanak, keluarga serta pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kedua, Diperlukan upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan TK dan penyebaran anak didik TK antar wilayah serta antar TK, disamping meningkatkan upaya pembauran antar anak didik yang berasal dari berbagai ras, tingkatan sosial dan ekonomi.

Ketiga, Diperlukan upaya untuk menyediakan guru TK dan prasarana pendidikan untuk TK di Kotamadya DT II Bandung, khususnya untuk Wilayah Ujungberung dan

Wilayah Gedebage.

B. Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan penelitian beserta implikasinya, maka dikemukakan beberapa rekomendasi sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut.

Untuk meningkatkan angka partisipasi murni pendidikan pada TK dan sekaligus meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di TK, direkomendasikan hal-hal berikut ini:

Pertama, Pemerintah dan lembaga legislatif seyogianya mempunyai kemauan politik untuk meningkatkan prioritas terhadap pendidikan di TK, jauh melebihi dari apa yang telah diberikannya selama ini. Hal ini telah terbukti dari keberhasilan upaya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada SD di Indonesia, dimana keberhasilannya tidak semata karena didorong oleh keprihatinan terhadap golongan yang tidak mampu dan perhitungan rasional tentang keuntungan yang dapat diraih melalui pendidikan di SD, tetapi yang mempunyai peranan utama adalah tekanan-tekanan politik sebagaimana dikemukakan Beeby (1981:287): "...bisa disimpulkan bahwa tekanan-tekanan politiklah yang telah memainkan peranan lebih besar daripada hasil-hasil penelitian kuantitatif yang penuh perhitungan".

Peningkatan prioritas pendidikan TK memang akan membawa konsekuensi pembiayaan sebagaimana diungkapkan dalam laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (Depdikbud, 1980), tetapi kemauan politik dari pemerintah dan lembaga legislatif untuk meningkatkan prioritas terhadap pendidikan di TK diyakini akan mampu mendorong peningkatan upaya mobilisasi sumber dana pendidikan TK, seperti mobilisasi sumber dana masyarakat yang terdapat di perusahaan-perusahaan - terutama yang mempekerjakan wanita - untuk berpartisipasi mendirikan serta mengembangkan TK dengan koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana direkomendasikan *Unesco International Conference on Public Education* pada tahun 1961 (Heron, 1987) dan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (Depdikbud, 1980).

Kedua, Segenap aparatur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seyogianya lebih meningkatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan TK. Kerjasama dapat dijalin aparatur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan organisasi sosial-kemasyarakatan seperti berbagai: organisasi wanita, organisasi profesi, organisasi penyelenggara TK dan organisasi keagamaan.

Ketiga, Meningkatkan upaya untuk meraih partisipasi masyarakat secara maksimal dalam pengadaan prasarana dan sarana pendidikan TK, serta mendukung pengembangan TK Al-Qur'an sebagai alternatif untuk mempercepat proses

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di TK.

Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan tidak dipaksakan sebatas uang, tetapi partisipasi masyarakat dapat dalam bentuk lainnya, seperti: Bahan bangunan yang baru maupun bekas, pinjaman rumah untuk ruangan kelas, alat-alat bermain dari bahan-bahan bekas/ tumbuh-tumbuhan yang terdapat di alam bebas, meja dan kursi untuk anak didik sebagai kompensasi dari kewajiban orangtua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka di TK, sehingga pada gilirannya keberhasilan pengembangan TK tidak tergantung pada dukungan uang saja.

Kasus yang menarik dari keberhasilan pelaksanaan gagasan di atas telah dibuktikan di negara Kamerun sebagaimana dipaparkan Heron (1987).

Aspek lain yang menarik untuk dikaji berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan TK yang cocok dengan kultur masyarakat Kotamadya DT II Bandung yang agamais (Masyarakat penduduk setiap wilayah di Kotamadya DT II Bandung yang beragama Islam yakni antara 82.00% - 97.58%) dan sekaligus biayanya terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah sekalipun, tampak dari peningkatan jumlah yang sangat pesat dari TK Al-Qur'an.

Perkembangan TK Al-Qur'an ini seyogianya dipandang sebagai alternatif yang sangat baik untuk menjangkau anak-anak dari segenap lapisan masyarakat, terutama anak-

anak yang selama ini belum menikmati pendidikan di TK disebabkan kendala kemampuan ekonomi keluarganya.

Jadi, keberadaan TK Al-Qur'an seyogianya didukung pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beserta Departemen Agama, terutama dalam pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikannya. Apalagi arah, sasaran dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Kotamadya DT II Bandung pada dasarnya untuk meningkatkan pendalaman umat pada keyakinan agama masing-masing, terlaksananya pendidikan keagamaan dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal (Pemerintah Kotamadya DT II Bandung, Repelita Ke-Lima 1989/1990 - 1993/1994, Buku I).

Keempat, Menyongsong pengembangan Kurikulum TK untuk mengganti *Kurikulum TK 1976 Yang Disempurnakan* sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, Pasal 9, Ayat 1, khususnya Bidang Pengembangan Agama yang diperuntukan anak didik yang beragama Islam, seyogianya diupayakan mencerap aspek-aspek positif dari materi pendidikan di TK Al-Qur'an.

Untuk menyeimbangkan pertumbuhan TK dan penyebaran anak didik TK antar wilayah serta antar TK, disamping meningkatkan upaya pembauran antar anak didik yang berasal dari berbagai ras, tingkatan sosial dan ekonomi, direkomendasikan hal-hal berikut ini:

Pertama, Pemerintah melalui Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan dapat menetapkan daerah layanan setiap TK (*catchment areas of the school*), dengan demikian memberikan landasan yang kokoh untuk penerimaan anak didik TK atas dasar rayon (Bagian wilayah penerimaan anak didik TK berdasarkan ketentuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di daerah yang bersangkutan).

Daerah layanan setiap TK dapat merujuk pada pendapat Clerence A Perry dan Clerence Stein yakni antara setengah km sampai satu km (Gallion, 1975), tetapi untuk Kotamadya DT II Bandung dapat ditentukan daerah layanan setiap TK tersebut sesuai dengan batas Wilayah Pemerintahan Pembantu Walikota Kotamadya DT II Bandung tempat lokasi TK berada.

Penetapan daerah layanan setiap TK itu memerlukan langkah mendasar berupa proses mengidentifikasi penyebaran populasi usia TK dan fasilitas pendidikan TK yang disebut *school-mapping* (Guruge, 1974). Dalam batas-batas tertentu, penelitian inipun telah menjangkau persoalan ini.

Penetapan daerah layanan setiap TK dengan dukungan *school-mapping*, tidak hanya bermanfaat bagi proses penerimaan anak didik yang berwawasan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di TK, sehingga tercapai keseimbangan pertumbuhan TK dan penyebaran anak didik yang relatif seimbang antar wilayah serta antar TK, tetapi lebih jauh dari itu akan menjadikan penggunaan

fasilitas pendidikan lebih maksimal, sehingga pengelolaan TK menjadi lebih efisien.

Kedua, Setiap pengelola TK seyogianya menunjukkan kepedulian sosial terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga yang keuangannya kurang mampu. Banyak cara yang dapat ditempuh antara lain: Menyeimbangkan jumlah anak didik yang berasal dari keluarga yang berbeda tingkatan sosial, ekonomi dan ras, disertai penetapan jumlah biaya pendidikan yang berstrata sehingga secara tidak langsung memungkinkan terjadi subsidi dari masyarakat yang keadaan keuangannya mampu kepada masyarakat yang keadaan keuangannya kurang mampu.

Jika perlu, pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dapat menetapkan perimbangan aspek-aspek tersebut di atas.

Untuk menyediakan guru TK dan prasarana pendidikan bagi TK di Kotamadya DT II Bandung, khususnya untuk Wilayah Ujungberung dan Wilayah Gedebage, direkomendasikan hal-hal berikut ini:

Pertama, Upaya pengembangan guru dan prasarana pendidikan TK untuk tahun 1992/1993 - 1996/1997 di Kotamadya DT II Bandung seyogianya lebih diprioritaskan ke Wilayah Ujungberung dan Wilayah Gedebage.

Potensi yang terdapat di kedua wilayah ini relatif besar, karena di kedua wilayah ini sedang tumbuh kawasan pemukiman, kawasan industri dan kawasan perkantoran. Ini

berarti sumber anak didik untuk TK di kedua wilayah ini diproyeksikan cukup banyak dan sumber biaya untuk mendukung penyediaan serta pengembangan TK cukup tersedia yakni dunia industri/ perusahaan pembangunan perumahan. Masalahnya sekarang: Bagaimana strategi mendayagunakan sumber-sumber yang potensial tersebut secara maksimal?

Langkah awal dalam mendayagunakan potensi yang ada di masyarakat untuk penyediaan dan pengembangan prasarana pendidikan TK adalah peningkatan koordinasi antara Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya DT II Bandung dengan Pemerintah Kotamadya DT II Bandung. Ini sangat diperlukan mengingat Pemerintah Kotamadya DT II Bandung mempunyai kewenangan dalam menentukan lokasi bangunan perumahan/ industri dan ijin mendirikan bangunan, sehingga ia berada di posisi yang relatif kuat untuk mengadakan pendekatan kepada para pengusaha pembangunan perumahan/ industriawan agar ikut memikul tanggung jawab untuk membangun serta mengembangkan TK (Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 1 Tahun 1987, dan Pemerintah Kotamadya DT II Bandung, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 1988).

Inisiatif untuk meningkatkan koordinasi di atas pada tahap awal disarankan dikembangkan oleh aparatur Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya DT II Bandung. Untuk kepentingan itu, aparatur Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya DT II

Bandung seyogianya mempunyai konsep pengembangan TK yang jelas disertai rencana yang realistis, sehingga menggugah semua pihak untuk berpartisipasi dalam pengembangan TK di setiap wilayah Kotamadya DT II Bandung.

Seiring dengan upaya pengembangan prasarana pendidikan TK, ditempuh pula langkah-langkah agar potensi anak didik yang akan memberikan kontribusi kepada pengembangan TK di Wilayah Ujungberung dan Wilayah Gedebage tidak lari ke wilayah lain, supaya fasilitas pendidikan TK yang ada di kedua wilayah ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga pada gilirannya dapat dicapai keseimbangan pengembangan fasilitas pendidikan antar wilayah di Kotamadya DT II Bandung sesuai dengan arah, sasaran dan kebijakan pembangunan di Kotamadya DT II Bandung (Pemerintah Kotamadya DT II Bandung, Repelita Ke-Lima 1989/1990 - 1993/1994, Buku I, II dan III).

Dengan demikian, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya DT II Bandung dapat menetapkan daerah layanan setiap TK (*catchment areas of the school*) dalam arti penduduk di Wilayah Ujungberung dan Wilayah Gedebage hanya diperbolehkan memasukan anak-anak mereka ke TK yang berada di wilayah masing-masing.

Pengembangan prasarana pendidikan di TK yang mengandalkan partisipasi masyarakat khususnya dunia industri/perusahaan pembangunan perumahan, tampaknya

memerlukan waktu yang relatif lama untuk mengatasi kelembaman masyarakat dalam memberikan respons terhadap gagasan memobilisasi dana yang bersumber dari dunia industri/perusahaan pembangunan perumahan bagi pembangunan prasarana pendidikan di TK.

Kalaupun pembangunan prasarana pendidikan untuk TK-TK baru dapat diwujudkan dan daerah layanan setiap TK (*Catchment areas of the school*) telah ditetapkan, masih ada kendala lain yang diperkirakan akan muncul yakni reaksi sebagian masyarakat yang tetap menghendaki anak mereka dididik di TK yang selama ini mereka pandang telah mapan dan mempunyai *citra prestasi akademis baik*.

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, seyogianya dikembangkan afiliasi beberapa TK yang belum mapan dengan TK yang sudah mapan atau setiap TK yang telah mapan diberi tanggung jawab oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya DT II Bandung untuk melakukan kerja sama dalam membina pengembangan beberapa TK tertentu.

Kedua, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam hal ini IKIP/FKIP seyogianya mengembangkan program studi yang mampu menghasilkan tenaga kependidikan TK yang profesional dan sekaligus mengembangkan *program penyetaraan* bagi guru-guru TK yang belum memiliki kewenangan penuh sebagai guru TK, minimal setara D₂ Pendidikan Guru TK.

Kebutuhan akan tenaga guru dalam arti: "...tuntutan

pemakai jasa profesional guru untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak didik pada lembaga pendidikan pemakai jasa guru" (Mohammad Fakry Gaffar, 1987:77), merupakan aspek yang esensial dalam kerangka upaya peningkatan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di TK.

Kebutuhan akan guru TK tersebut menyangkut masalah jumlah yang mencukupi dengan kualitas yang memadai.

Dimensi kuantitatif dari kebutuhan guru TK menyangkut jumlah guru yang seimbang dengan jumlah anak didik TK, sedangkan dimensi kualitatif dari kebutuhan guru TK mengacu kepada isi Peraturan Pemerintah RI, Nomor: 27 Tahun 1990, Pasal 14, Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Guru Taman Kanak-kanak merupakan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sebagai guru Taman Kanak-kanak".

Secara umum, kualifikasi guru yang diperlukan dalam era pembangunan di Indonesia menurut Tisna Amidjaja (1981) adalah guru yang mampu dan siap berperan secara profesional di lingkungan sekolah dan masyarakat, serta memiliki kompetensi pribadi, profesi dan kemasyarakatan. Jadi, guru yang diperlukan adalah mereka yang memiliki sikap pribadi yang terpuji, menguasai aspek akademis (Seluk beluk TK, anak didik TK dan disiplin pendidikan), serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Guru TK yang profesional pada dasarnya guru yang

bertugas dengan dasar ilmu/ teori sistematis dan berpedoman pada kode etik dengan meperoleh dukungan persatuan profesi, klien, masyarakat dan pemerintah atas kewenangan profesionalnya (Sikun Pribadi, 1975; Oteng Sutisna, 1987. Dengan merujuk pada pendapat: Frank H Blackington & Robert S Patterson, Horton, Myron, Lieberman, Tawney, Ernest Greenwood, WE Moore, HM Vollmer & DL Mills, Educational Policies Commision of the NEA, dan American Association of School Administrators).

Untuk mendapatkan guru yang profesional menurut Achmad Sanusi dalam Kompas (27-1-1990) sekurang-kurangnya dibutuhkan waktu empat tahun dalam mengenyam pendidikan tinggi yakni lulusan IKIP/FKIP. Indikasi ke arah ini sebenarnya sudah tampak dari pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR-RI bahwa pada waktunya guru TK harus lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Program D₂ (Kompas, 14-2-1991).

Keberadaan guru TK yang profesional merupakan kebutuhan utama dalam upaya pendidikan di TK, karena guru TK lebih berperan sebagai *pendidik* daripada *pengajar*, apalagi TK merupakan bentuk pendidikan prasekolah yang berada di jalur pendidikan sekolah (Peraturan Pemerintah RI, Nomor 27 Tahun 1990, Pasal 4, Ayat 2).

Lebih jauh lagi dapat dilacak dari kontribusi guru profesional di TK terhadap keberhasilan pendidikan di SD,

ternyata TK yang didukung guru yang profesional memberikan kontribusi yang berarti dalam mengurangi angka pengulangan dan putus sekolah di SD, disamping memberikan masukan peserta didik kepada SD yang relatif bermutu (Hartup & Smothergill, 1970; Tizard, 1975; Bettelheim & Takanishi, 1976; Sylva, dkk., 1980; Sardja, 1981; Soepartinah Pakasi, 1981; dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987 a).

Kontribusi pendidikan di TK kepada keberhasilan pendidikan di SD dapat lebih dipahami manakala menyimak hasil penelitian Somerset pada tahun 1990 yang menunjukkan tingginya laju pengulangan pada tiga kelas terendah dan diikuti dengan tingginya laju putus sekolah pada siswa kelas 4 dan kelas 5 SD di Indonesia, ada kaitannya dengan kenyataan bahwa sebagian besar siswa SD di kelas yang lebih rendah itu harus belajar bahasa Indonesia (Kompas, 12-3-1991). TK dalam kaitannya dengan masalah ini telah terbukti mampu *menjembatani* anak yang *berbahasa ibu* menjadi *lebih mengakrabi* bahasa Indonesia, sehingga peserta didik di SD yang berasal dari TK lebih menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dalam bidang Bahasa Indonesia dan Matematika (Sardja, 1981).

Setelah dipaparkan makna guru profesional bagi pendidikan di TK, maka selanjutnya muncul pertanyaan: Setelah SPG-TK dialih fungsikan dan pendidikan para calon guru SD diserahkan kepada PGSD di pendidikan tinggi, dari

manakah guru TK yang profesional itu akan diperoleh atau lembaga manakah yang bertanggung jawab dalam penyediaan guru TK yang profesional?

Tentu yang bertanggung jawab adalah LPTK dan sesuai dengan uraian di atas yang seyogianya bertanggung jawab dalam penyediaan guru TK yang profesional adalah IKIP/FKIP. Sudahkah IKIP/FKIP mengembangkan program studi yang akan menghasilkan tenaga kependidikan yang bertugas secara profesional di TK? Jika belum, maka dapat dikembangkan pada lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan di IKIP atau Jurusan Ilmu Pendidikan di FKIP.

Jika sudah, diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang terus menerus antara pihak-pihak yang terlibat dengan penyediaan dan penggunaan tenaga kependidikan di TK, sehingga tercapai keseimbangan antara permintaan dan penediaannya (Deklarasi Konvensi Bandung, 1988 dan Mohammad Fakry Gaffar, 1987)

C. Penutup

Penulis berpendapat bahwa studi ini telah mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan, tetapi disadari sepenuhnya bahwa studi ini disamping memiliki segi-segi kebaikannya, juga memiliki segi-segi keterbatasannya yakni dalam studi ini kebutuhan tenaga

guru dan prasarana pendidikan baru terbatas pada proyeksi menurut kecenderungan yang ada pada TK di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta belum mengkaji aspek pembiayaan pendidikan di TK secara terinci dan mendalam.

Dengan demikian, bagi yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dapat menjangkau pendidikan yang setara TK di luar TK yang berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, seperti yang terdapat di pondok pesantren. Masalah pembiayaan pendidikan di TK, juga merupakan aspek yang menarik untuk diteliti secara mendalam, sehingga dapat ditemukan unit-unit kegiatan yang mesti dibiayai dalam pengelolaan suatu TK beserta besar biaya per unit kegiatan tersebut. Sehingga dapat dikaji lebih lanjut biaya pendidikan per anak didik di TK.

Akhirnya, penulis berharap semogalah informasi yang terungkap dalam studi ini dapat merangsang pemerintah, keluarga dan masyarakat lebih meningkatkan tanggung jawabnya dalam rangka peningkatan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di TK. Lebih dari itu semuanya, semogalah studi ini mendapat ridlo Allah. swt.